

SINOPSIS

Revolusi Islam Iran (1978-1979) yang mengakhiri kekuasaan monarkhi absolut Duasti Pahlevi, merupakan salah satu fenomena yang paling spektakuler pada abad ke-20. betapa tidak, salah satu rezim terkuat didunia ke-tiga yang juga ditopang sepenuhnya oleh sebuah Negara adikuasa seperti Amerika Serikat, berhasil diruntuhkan oleh gelombang kekuatan rakyat yang justru digerakan oleh seorang ulama "Tua". Perbedaan yang mencolok diantara keduanya adalah, jika sebelum revolusi, Iran merupakan Negara sekuler, maka pasca Revolusi, Iran adalah Negara yang menganut system pemerintahan Syiah dalam konsep wilayata al faqih yang dipelopori oleh Imam Khomeini. Salah satu pemikiran revolusioner yang ditawarkan oleh Imam Khomeini adalah gagasannya mengenai konsep pemerintahan Islam Syiah yaitu, konsep wilayatul faqih yang berlandaskan konsep Imamah. Sebenarnya penyebaran Islam di Indonesia sendiri sudah sejak lama mengenal adanya paham Islam Syiah. Berbagai macam pemikiran yang berkembang di Indonesia bukan hanya dari pemikiran-pemikiran Sunny namun Syiah juga ada. Berdirinya organisasi-organisasi masa Syiah seperti Ikatan Jamaah AhlulBait Indonesia (IJABI) dan Forum Alumni HMI (FAHMI)) adalah Imbas dari Revolusi Islam Iran yang di motori Imam Khomeini

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, penulis mencoba menjelaskan Pemerintahan Islam Syiah menurut Imam Khomeni tentang pemerintahan Islam yang mana walaupun sedikit ada kesamaan dengan pemerintahan Islam yang ada pada konsep pemerintahan Islam Sunny, namun yang paling mencolok adalah perbedaannya dengan pemerintahan ala barat. Pemerintahan yang dicetuskan Imam Khomeini dengan menggunakan system Wilayat al Faqih (pemerintahan para Ulama), yang diadopsi dari ajaran Syiah Imamiah (dua belas Imam) tentang Imamah (kepemimpinan). Adapun dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system pemerintahan Islam Syiah menurut Imam Khomeini dengan konsep pemerintahan Wilayatul Faqih (pemerintahan para faqih) yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai Wilayatul Faqih yang menjadi bagian terpenting dalam sistem politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh faqih. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Imam/Faqih dan mekanisme pemilihan diserahkan kepada rakyat Iran untuk memilih calon yang dikehendaki namun tidak menghilangkan posisi ulama, hal ini dapat kita lihat kuatnya posisi ulama dalam pemerintahan Iran yaitu pemimpin atau dewan pimpinan, yang sekarang dipegang oleh Ayatullah Ali Khamenei. Kekuasaan pemimpin tidak akan ada kecuali dengan adanya Dewan ahli, yang mana anggotanya di pilih oleh rakyat Iran, yang mana mereka bermusyawarah untuk menentukan orang yang menjadi pemimpin.

Kelamahan dari system Pemerintahan Islam Syi'ah yang dicetuskan Imam Khomeini adalah mencari seorang marja/Faqih pengganti yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Kelebihan dari Sistem Pemerintahan ini adalah didukung oleh doktrin-doktrin dari Mazhab Syi'ah yang merupakan suatu Mazhab terbesar di Republik Islam Iran. Kekharismaan seorang tokoh memang dapat meredam ambisis-ambisi pribadi dari